



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
(LKjIP)
KECAMATAN JATILAWANG
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KECAMATAN JATILAWANG
KABUPATEN BANYUMAS**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2019.

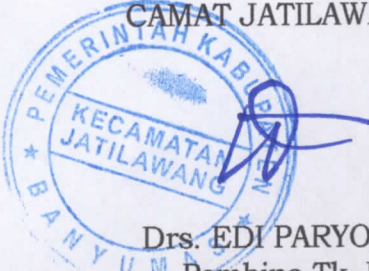
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jatilawang, Januari 2020

CAMAT JATILAWANG



Drs. EDI PARYONO
Pembina Tk. I

NIP 19631231 198503 1 112

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Jatilawang Tahun 2019 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban /akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Jatilawang tahun 2013-2019. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Jatilawang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 909.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 765.235.981 atau mencapai 84 %.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari Kecamatan Jatilawang indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2019 adalah sangat berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatilawang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Lampiran	6
 BAB I PENDAHULUAN	 7
A. Gambaran Umum	7
B. Maksud dan Tujuan	12
C. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 14
A. Rencana Strategis	14
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	15
D. Rencana Anggaran Tahun 2019	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 18
A. Capaian Indikator Kerja Utama	18
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	22
C. Akuntabilitas Keuangan	28
D. Prestasi dan Penghargaan	31
 BAB IV PENUTUP	 32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatilawang Tahun 2019
Tabel 2.2	:	Indikator Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2019
Tabel 2.3	:	Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang... Tahun 2019.
Tabel 2.4	:	Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2019
Tabel 3.1	:	Skala Nilai Peringkat Kinerja
Tabel 3.2	:	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Tabel 3.3	:	Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
Tabel 3.4	:	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019
Tabel 3.5	:	Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2019
Tabel 3.6	:	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019
Tabel 3.7	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.8	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat desa / kelurahan
Tabel 3.9	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan desa / kelurahan
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Tabel 3.10	:	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Data masyarakat miskin
Tabel 3.11	:	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Jatilawang tahun 2019
Tabel 3.12	:	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Per sasaran Program tahun 2019
Tabel 3.13	:	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian sasaran Tahun 2019
Tabel 3.14	:	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Jatilawang
Lampiran 3	Penghargaan yang Diperoleh Kecamatan Jatilawang

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Jatilawang Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Jatilawang Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2019. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Jatilawang

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas seluas 4815,92 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 1,643 ha atau sekitar 34 % dari wilayah Kecamatan Jatilawang sedangkan sisanya sebesar

3172 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 1642 ha lahan bukan pertanian. Di Kecamatan Jatilawang terdapat 11 desa.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Jatilawang dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 21.687 jiwa, dengan penduduk sebesar 59.073 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 29.295 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 29.777 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Jatilawang

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Jatilawang pada tahun 2019 adalah sebanyak 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 18 orang
- Tenaga kontrak : 7 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;

- d. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya tidak terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, sarana

prasarana dan kerumahtanggaan, hukum, kehumasan dan protokol, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan kecamatan.

4. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, pekerjaan umum, penataan ruang, energi dan sumberdaya mineral, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemerintahan.
5. Seksi Pelayanan dan Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Perijinan, penanaman modal, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelaksanaan pelayanan sesuai standar pelayanan serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang Seksi Pelayanan dan Perijinan.
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang pendidikan, sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, persampahan dan kebersihan, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri dan perdagangan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan, kearsipan dan perpustakaan, ketransmigrasian dan

bidang agama, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana, serta dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Jatilawang tahun 2019 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Kondisi Umum Kecamatan
 - 3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Maksud Dan Tujuan
- C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- D. Rencana Anggaran Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kerja Utama
- B. Pengukuran, Evaluasi dan analisis Kinerja Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan
- D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2019 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2013 – 2019 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kecamatan Jatilawang sesuai dengan Renstra Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tahun 2013 – 2019 adalah “ TERWUJUDNYA KECAMATAN JATILAWANG YANG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA NENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PADA TAHUN 2019

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan pengelola perencanaan anggaran Kecamatan Jatilawang yang berbasis kinerja, bermanfaat dan terukur;
2. Memantapkan kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi dalam penyelenggara pemerintahan desa.
4. Memantapkan kualitas data dan informasi publik secara aktual dan terpercaya dengan sistem layanan dan akses informasi berbasis e-government.
5. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset serta standar pelayanan umum di lingkungan kecamatan jatilawang secara berkualitas dan memadai.

Visi dan misi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas 2013- 2019 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kecamatan Jatilawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jatilawang
Tahun 2019

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kecamatan Jatilawang
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN JATILAWANG
TAHUN 2019

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) Pelayanan Kecamatan	90
2. Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan	Prosentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu dan Prosentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif	95%
3. Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	1. Prosentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100%
	2. Prosentase Linmas terbina	70%
	3. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	100%
	4. Prosentase pembayaran PBB di Kecamatan	90%
	5. Prosentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	95%
	6. Presentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jatilawang pada tahun 2019 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Jatilawang setelah perubahan sebesar Rp. 909.500.000 dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. 696.340.000,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 213.160.000,- Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2019

SASARAN PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Rp. 706.200.00,00
2. Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan	Rp. 45.300.000,00
3. Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 158.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Jatilawang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2019.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Jatilawang Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Angka	90	82,03	91
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan	Prosentase layanan Kecamatan disesuaikan tepat waktu	%	95	75	78
		Prosentase kelompok masyarakat yang aktif	%	95	75	78
3	Meningkatnya peran Kecamatan dan kelurahan	1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	80	80
		2. Persentase Linmas terbina	%	70	65	92
		3. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	%	100	85	85
		4. Persentase Pembayaran PBB di Kecamatan	%	95	85	89

		5. Presentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	95	80	88
		6. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	100	84	84

Dari 3 sasaran strategis dengan 9 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Jatilawang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	1	1
2	Tinggi	2	8
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1	Mewujudkan kinerja pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	-	-	-	-	Sangat tinggi

	Kecamatan yang prima	Pelayanan Kecamatan						
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan	Prosentase layanan Kecamatan disesuaikan tepat waktu	78	-	-	-	Tinggi	-
		Prosentase kelompok masyarakat yang aktif	80	-	-	-	Tinggi	-
3	Meningkatnya peran Kecamatan dan kelurahan	1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	80				Tinggi	
		2. Persentase Linmas terbina	92					Sangat tinggi
		3. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	85				Tinggi	
		4. Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	89				Tinggi	
		5. Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	88				Tinggi	
		6. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	84				Tinggi	

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Jatilawang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2019 setelah dilaksanakan reviu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1 Indikator
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan Pemberdayaan	2 Indikator
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	6 Indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Angka	79,42	81,49	102,6	90	82,03	91

2	Prosentase layanan kecamatan disesuaikan tepat waktu		74	70	94,59	95	75	78
3	Persentase kelompok masyarakat di Kecamatanm yang aktif		70	70	100	95	75	78
4	Presentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik		-	-	-	100	80	80
5	Persentase Linmas terbina		-	-	-	70	65	92
6	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan		-	-	-	100	85	85
7	Persentase pembayaran PBB di Kecamatan		-	-	-	95	85	89
8	Persentase Kelompok Swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif		-	-	-	95	80	88
9	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes		-	-	-	100	84	84

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan 1 indikator kinerja adalah sebesar 91 % dengan predikat Tinggi Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Angka	79,42	81,49	102,6	90	82,03	91

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya manusia yang sangat meningkat terutama dalam hal penguasaan Teknologi informatika
2. Sarana prasarana yang meningkat

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga kerja PNS untuk membantu tugas pelayanan
2. Kurangnya BinteK dan Kursus tentang tugas-tugas yang mendukung pelayanan

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk membantu pelayanan
2. Memanfaatkan pelatihan-pelatihan yang ada untuk mendukung tugas pelayanan

2. Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan” dengan 2 indikator kinerja adalah sebesar 78 % dengan predikat Tinggi

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	90	90	95	75	78
2	Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	-	-	-	95	75	78

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya lembaga-Lembaga masyarakat yang aktif dalam mengikuti kegiatan Pemerintahan , Pembangunan dan kemasyarakatan,
2. Terjalin Kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dan Desa dalam mengembangkan lembaga Kemasyarakatan Desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran Dana yang mendukung untuk berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan sehingga untuk kegiatan terbentur dengan anggaran,
2. Kurangnya pelatihan-pelatihan kepada lembaga masyarakat dalam berorganisasi sehingga walaupun berjalan tapi kurang berkembang dengan baik.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Mengusulkan anggaran Lembaga masyarakat sehingga akan meningkatkan perkembangan dalam keikutsertakan dalam pembangunan masyarakat
2. Mengusulkan agar lembaga kemasyarakatan untuk lebih diperbanyak dalam pelatihan-pelatihan yang ada untuk meningkatkan peran serta lembaga Kemasyarakatan.

3. Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan” dengan 6 indikator kinerja adalah sebesar 86 % dengan predikat Tinggi

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	-	-	-	100	80	80
2	Persentase Linmas terbina	%	-	-	-	70	65	92
3	Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	%	-	-	-	100	85	85

4	Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	%	-	-	-	95	85	89
5	Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	-	-	-	95	80	88
6	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	-	-	-	100	84	84

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sering diadakan pembinaan-pembinaan ke desa-desa tentang administrasi Pemerintahan Desa
2. Kerjasama antar Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam peningkatan tertib administrasi Desa.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang ada di desa masih ada yang tidak menguasai teknologi Informatika sehingga menghambat dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa.
2. Anggaran yang ada dikecamatan masih kurang dalam hal pelaksanaan monitoring dan Evaluasi ke desa-desa dan tenaga yang masih kurang , dikarenakan hanya dilaksanakan oleh 1 orang PNS.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Diharap kepada Kepala Desa agar meningkatkan Sumber Daya Manuasia khususnya Perangkat Desa dalam bidang TIK.

2. Memanfaatkan tenaga yang ada untuk melaksanakan money administrasi Pemerintahan yang ada dengan di bantu kasi-kasi yang lain.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Jatilawang yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Jatilawang.
Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.859.537.870	1.675.974.545	90,0
2.	Belanja Langsung	909.500.000	765.235.981	84,0

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jatilawang
Per Sasaran Program Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan yang prima	Rp. 706.200.000	Rp. 599.159.181	84
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan	Rp. 45.300.000	Rp. 40.053.000	88

3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan	Rp. 158.000.00	Rp. 126.023.800	79
----	--	----------------	-----------------	----

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Jatilawang tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	91	Rp. 599.159.181	84
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan	2	78	Rp. 40.053.000	88
3.	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	6	86	Rp. 126.023.800	79
JUMLAH		9			

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Jatilawang.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	91	84	-
2	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan	2	78	88	-
3	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	6	86	79	-
JUMLAH		9			

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Jatilawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya Kecamatan Jatilawang telah memperoleh penghargaan tingkat kabupaten atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Jatilawang telah menerima **Piagam penghargaan Program Adibuana Bhakti Tahun 2019 katagori Kecamatan Sedang peringkat Pertama** sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB IV

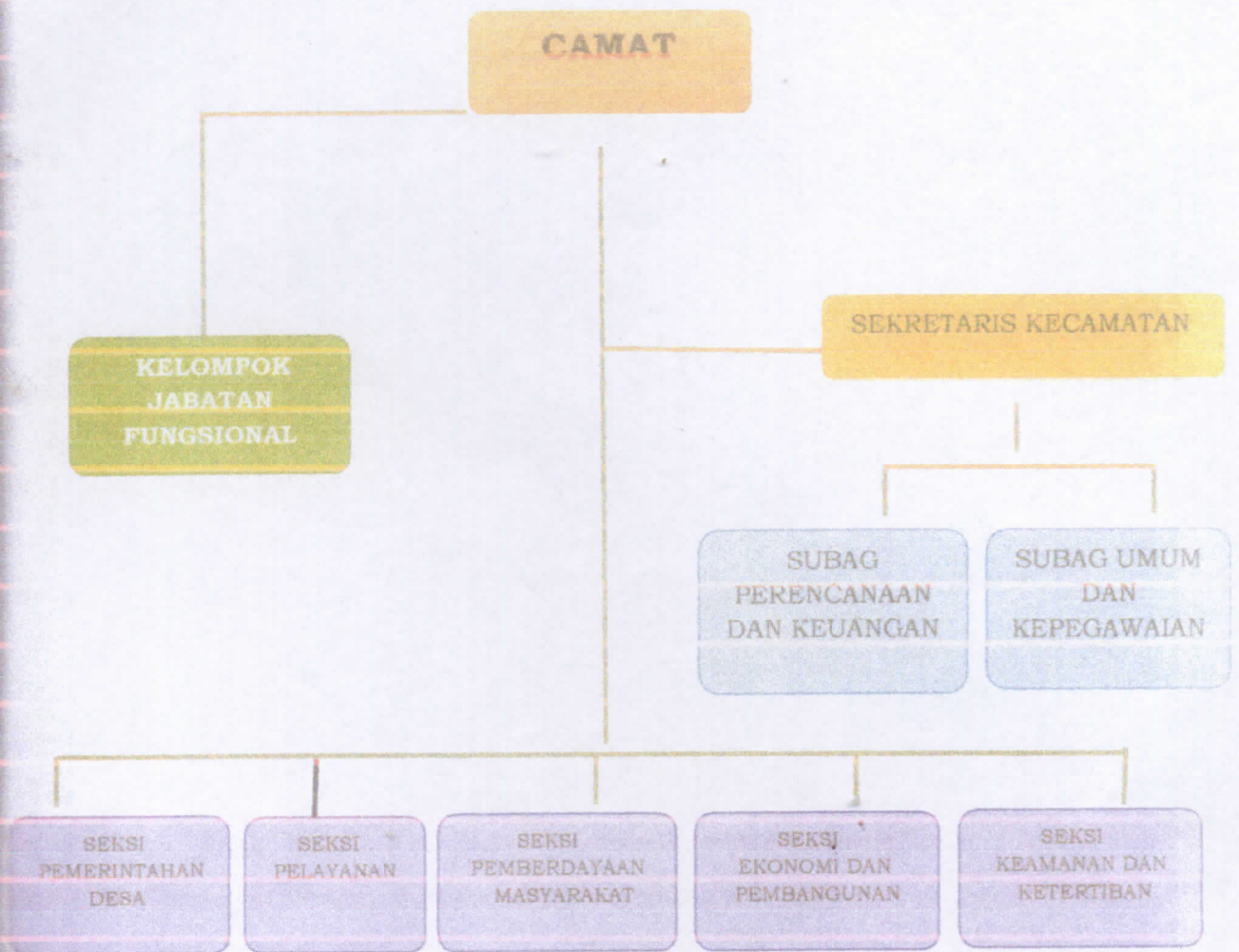
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatilawang Tahun 2019 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Struktur Organisasi Kecamatan Jatilawang





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG

Jln. Raya Jatilawang No Telp. (0281) 6848539
JATILAWANG 53174

Siambi 1/4 '20.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. EDI PARYONO
Jabatan : CAMAT JATILAWANG
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. ACHMAD HUSIEN
Jabatan : BUPATI BANYUMAS
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jatilawang, April 2019

Pihak Kedua
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

Pihak Pertama
CAMAT JATILAWANG

Drs. EDI PARYONO
Pembina Tk. I
NIP. 19631231 198503 1 112



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG

Jl. Jatilawang No. 1 Telp. (0281) 6848539

Telp/Fax (0281) 6848539

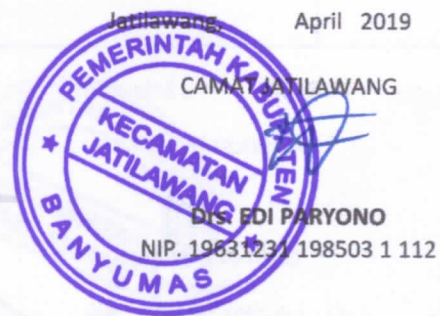
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KECAMATAN JATILAWANG

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat	85
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	Formulasi : Jumlah layanan kecamatan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah layanan yang ada X 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan jumlah layanan di Kecamatan	95%
		Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	Formulasi : Jumlah kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif dibagi jumlah kelompok masyarakat yang ada X 100% Tipe Perhitungan : Kumulatif Keterangan : Lembaga kemasyarakatan meliputi RW, RT, PKK, Karangtaruna, LPM. Kriteria lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah : 1. Mempunyai rencana/ agenda / program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (di kecamatan Jatilawang) 2. Ketua lembaga kemasyarakatan menghadiri acara Musrenbang 3. Melaksanakan minimal 60 % dari seluruh agenda/ program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan.	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya peran kecamatan dan kelurahan	<p>1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik</p> <p>2. Persentase Linmas terbina</p> <p>3. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan</p> <p>4. Persentase pembayaran PBB di Kecamatan</p>	<p>Formulasi = Jumlah permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik dibagi jumlah permohonan X 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan = Kumulatif</p> <p>Sumber data = Data permohonan administrasi kependudukan dan PATEN</p> <p>Formulasi : jumlah linmas yang dibina dibagi jumlah linmas yang ada X 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber data : Data Linmas</p> <p>Formulasi : jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada X 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber data : Data desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan</p> <p>Keterangan : Pemerintah desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan adalah pemerintah desa/kelurahan yang tertib melakukan administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa atau permendagri nomor 34 Tahun 2007</p> <p>Formulasi : Realisasi PBB dibagi target X 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber data : Data Realisasi PBB</p>	<p>100%</p> <p>70%</p> <p>100%</p> <p>90%</p>

	5. Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	Formulasi : Jumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang aktif dibagi jumlah kelompok swadaya masyarakat yang ada X 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Data KSM	95%
	6. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	Formulasi = Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes dibagi jumlah desa yang ada X 100 % Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Data desa yang dibina.	100%

Program	Anggaran
1 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan	Rp. 491.500.000,-
2 Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Rp. 268.000.000,-
Jumlah Anggaran	Rp. 759.500.000,-



DAFTAR NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

PROGRAM			KEGIATAN		
NO	NAMA	JUMLAH ANGGARAN	NO	NAMA	JUMLAH ANGGARAN
1.	Program Pelayanan Administrasi	293.999.992,00	1.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.599.992,00
			2.	Penyediaan Bahan logistik Kantor	70.000.000,00
			3.	Penyedia Tenaga administrasi,Keamanan,Pengemudi, dan Kebersihan	76.000.000,00
			4.	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	90.000.000,00
			5.	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	20.400.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136.800.000,00	1.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.800.000,00
			2.	Pemeliharaan rutin Gedung Kantor dan Rumah Dinas	43.000.000,00
			3.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas/Operasional	20.000.000,00
			4.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00
3.	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.000.000,00	1.	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	15.000.000,00
4.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	256.600.000,00	1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	200.000.000,00
			2.	Fasilitasi Tim Penanggulangan kemiskinan Kecamatan	40.000.000,00
			3.	Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	16.600.000,00

Jatilawang, April 2019


 CAMAT JATILAWANG
 Drs. EDI PARYONO
 Pembina Tk. I
 NIP. 19631231 198503 1 112

DAFTAR NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

PROGRAM			KEGIATAN		
NO	NAMA	RENCANA JUMLAH ANGGARAN	NO	NAMA	RENCANA JUMLAH ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran		1.	Penyediaan Jasa peralatan dan perkantoran	50.000.000,00
			2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.000.000,00
			3.	Penyediaan Tenaga	
			3.	Administrasi, keamanan, pengemudi dan tenaga kebersihan	92.400.000,00
			4.	Rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan Dinas PD	100.000.000,00
			5.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PD	73.100.000,00
			6.	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor PD	15.000.000,00
			7.	Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas PD	40.000.000,00
			8.	Pemeliharaan rutin/ Berkala dinas/operasional kendaraan PD	30.000.000,00
2.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan		9.	Pengendalian dan penatausahaan Keuangan Daerah	21.000.000,00
			1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	92.000.000,00
			2.	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan	40.000.000,00
			3.	Fasilitasi Intensifikasi PBB	15.000.000,00
			4.	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	65.000.000,00
			5.	Peningkatan kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	41.000.000,00
			6.	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDesa Kecamatan	15.000.000,00
			JUMLAH		759.500.000,00

Jatilawang, April 2019

KAMAT JATILAWANG



DR. EDI PARYONO

NIP. 1963123 198503 1 112



PIAGAM

ADIBUANA BHAKTI

NOMOR : 660/309 /2019

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :


KECAMATAN JATILAWANG

KATEGORI KECAMATAN SEDANG

ATAS UPAYA TERBAIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP

PURWOKERTO, 21 FEBRUARI 2019
BUPATI PANYIJANAS


H. ACHMAD MUSEIN



ADIBUANA BHAKTI
KATEGORI KECAMATAN SEDANG
PERINGKAT PERTAMA
KECAMATAN JATILAWANG